

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ali, M. (2017). *Kebijakan Pendidikan Menengah dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Andrianto, N. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Djojosoekarto, A. (2008). *E-Procurement di Indonesia, Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik*. Jakarta: Kemitraan Partnership dan LPSE Nasional.
- Haryansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hunja, R. (2012). *E-Procurement: Opportunities & Challenges*. World Bank.
- Islamy. (1997). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jasin, M. (2007). *Mencegah Korupsi Melalui E-Procurement*. Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi.
- Kurniadi, B. D. (2011). *Praktek Penelitian Kualitatif: Pengalaman dari UGM*. Yogyakarta: PolGov.
- Purwanto, Agus, E., & Sulistyastuti, R. D. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Santoso, P. (2002). *Modul Kuliah Kebijakan Pemerintahan dan Implementasinya, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: UGM.
- Setyadiharja, R. (2017). *E-Procurement: Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik*. Yogyakarta: Deepublish.

- Simamora, S. (2013). *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya: Wins & Partners Law Firm & LbJ.
- Subarsono, A. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutedi, A. (2012). *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Grafika.
- Suwitri, S. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suyanto, S. B. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tambunan, R. M. (2003). *Pedoman Penyusunan: Standar Operating Procedures (SOP)*. Jakarta: Maestas Publishing.
- Wahab, S. A. (1997). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (Kebijakan Publik, Proses dan Analisis). 1994. Jakarta: CV.Intermedia.
- Widodo, J. (2001). *Implementasi Kebijakan*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Widodo, J. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Banyumedia.

Jurnal dan Majalah

- Hidayati, N. (2018). Urgensi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Undang-Undang. *Jurnal Pengadaan*, 1-2.
- Nurdin, E. (2016). Menengok Nilai dan Budaya Kerja Kementerian Perindustrian. *SOLUSI: Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian*, 11.

RUP: Langkah Awal Manajemen Pengadaan. Warta *E-Procurement*. Publikasi Layanan *E-Procurement* Kementerian Keuangan. Edisi XV Tahun 2015.

Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah. 2002. Bappenas dan Depdagri

Warta *E-Procurement*: Publikasi Layanan *E-Procurement* Kementerian Keuangan. 2015. Edisi XV

Peraturan

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 601 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jas Pemerintah

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Media Online

<http://redesain.poltekkes-malang.ac.id/index.php/rumah/detail/artikel/13/149>

diakses pada tanggal 12 Desember 2016

<http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/pembenahan-sistem-pengadaan-barang-dan-jasa-tingkatkan-daya-saing-nasional/> diakses pada 2 Januari 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/25/19350061/ICW-sektor-transportasi-paling-banyak-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-> diakses pada 2 Januari 2021

<https://www.voaindonesia.com/a/proyek-saluran-air-yogya-suap-mengalir-sampai-jauh/5246755.html> diakses pada 2 Januari 2021

<https://www.gatra.com/detail/news/469003/hukum/syukuran-proyek-dinas-pu-yogya-kumpulkan-uang-kontraktor-> diakses pada 2 Januari 2021

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Guntur, Pokja Pemilihan ULP Kota Yogyakarta pada 8 Maret 2017

Wawancara dengan Bapak Agus, Staff LPSE Kota Yogyakarta pada 17 Maret 2017 dan 19 Mei 2017

Wawancara dengan Bapak Sigit, PPK Dinas PUPKP Kota Yogyakarta pada 4 Mei 2017

Wawancara dengan Bapak Arifin, Pokja Pemilihan ULP Kota Yogyakarta pada 24 Mei 2017

Wawancara dengan Bapak Aris, Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta pada 14 Agustus 2017, 29 Mei 2019 dan 30 Juli 2020

Wawancara dengan Bapak Warno, PPK BPKAD pada 20 Maret 2018

Wawancara dengan Ibu Iik, PPK Kecamatan Umbulharjo pada 30 Maret 2018

Wawancara dengan Bapak Kadir, pelaku usaha dari CV. Barokah Abadi pada 20 Februari 2018

Wawancara dengan Bapak Thoriq, pelaku usaha dari CV. Tierent pada 20 Februari 2018

Wawancara dengan aktivis *Jogjakarta Corruption Watch* (JCW) pada 12 Januari 2021

Wawancara dengan aktivis *Jogja Government Watch* (JGW) pada 13 Januari 2021